ABSTRAK

ANALISA PENERAPAN *E-GOVERMENT*
MELALUI SUB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL (SSIM-PKBN)
DALAM MENINGKATKAN SOSIALISASI PROGRAM
KELUARGA BERENCANA(KB)
DI PROVINSI JAWA BARAT

Dalam upaya mengembangkan Pemerintahan yang berbasis elektronik, sebagai wujud penerapan *E-Government* Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat membangun Sub Sistem Informasi Manajemen Program Keluarga Berencana Nasional (SSIM-PKBBN) bagian dari *website* *www.bkkbn.go.id* yang bertujuan sebagai pusat informasi tentang Program Keluarga Berencana (BKKBN) dan informasi lainnya yang berguna untuk masyarakat dan aparatur di BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Rikardus Eko Indrajit. Mengenai analisa kebijakan penerapan *E-Government* dalam *Buku Pintar Linux : Membangun Aplikasi E-Government*. Dalam penelitian ini penelitian ini terdiri dari enam indikator, yaitu Data infrastruktur, Infrastruktur legal, Infrastruktur institusional, Infrastruktur manusia, Infrastuktur teknologi, serta Strategi pemikiran dan kepemimpinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan dan observasi serta dengan melakukan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur BKKBN Provinsi Jawa Barat serta masyrakat yang memerlukan informasi tentang Keluarga Berencana dengan menggunakan teknik *purposive.*

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBBN yang ada dalam *website* *www.bkkbn.go.id* di BKKBN Provinsi Jawa Barat belum dikelola oleh lembaga khusus yang bergerak di bidang *E-Government* sehingga terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi tersebut adalah belum adanya peraturan teknis pelaksanaan dalam penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBBN BKKBN Provinsi Jawa Barat. Selain itu koordinasi antar instansi belum tercapai secara optimal karena masih kurangnya pemahaman tentang kegunaan SSIM-PKBBN bagi instansi dan ketersediaan jumlah aparatur yang dapat mempergunakan sarana teknologi yang tersedia guna menunjang penerapan *E-Government* melalui SSIM-PKBN di BKKBN Provinsi Jawa Barat masih terbatas .